

BAB 6: KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait determinan kepemilikan jaminan kesehatan nasional bagi pekerja sektor informal di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pekerja sektor informal yang memiliki JKN lebih dari separuh (71,26%) dibandingkan pekerja sektor informal yang tidak memiliki.
2. Pekerja sektor informal lebih tinggi pada kelompok usia pra pensiun (45-54 tahun) dengan proporsi 27,61% dan pekerja informal pada kelompok usia muda adalah yang paling rendah frekuensinya (8,49%).
3. Pekerja sektor informal berjenis kelamin laki-laki lebih dari separuh (58,7%) dari pekerja sektor informal perempuan.
4. Hampir seluruh pekerja sektor informal berasal dari kelompok pendidikan rendah (94,12%).
5. Lebih dari setengah pekerja sektor informal tinggal di perdesaan (66,67%).
6. Pekerja sektor informal yang bekerja di sektor non pertanian lebih dari separuh (51,9%) dibandingkan pekerja informal sektor pertanian.
7. Pekerja sektor informal lebih dari separuh berada pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah (59,82%).
8. Lebih dari separuh pekerja sektor informal yang menggunakan internet (53,81%).

9. Pekerja sektor informal yang mengaku tidak ada keluhan kesehatan adalah lebih dari separuh (62,97%).
10. Terdapat hubungan signifikan antara usia dengan kepemilikan JKN bagi pekerja sektor informal di Provinsi Sumatera Barat ($p\text{-value} = 0,000$).
11. Terdapat hubungan signifikan antara jenis kelamin dengan kepemilikan JKN bagi pekerja sektor informal di Provinsi Sumatera Barat ($p\text{-value} = 0,000$).
12. Terdapat hubungan signifikan antara tingkat pendidikan dengan kepemilikan JKN bagi pekerja sektor informal di Provinsi Sumatera Barat ($p\text{-value} = 0,023$).
13. Terdapat hubungan signifikan antara daerah tempat tinggal dengan kepemilikan JKN bagi pekerja sektor informal di Provinsi Sumatera Barat ($p\text{-value} = 0,000$).
14. Terdapat hubungan signifikan antara lapangan usaha dengan kepemilikan JKN bagi pekerja sektor informal di Provinsi Sumatera Barat ($p\text{-value} = 0,000$).
15. Tidak terdapat hubungan signifikan antara pengeluaran per kapita dengan kepemilikan JKN bagi pekerja sektor informal di Provinsi Sumatera Barat ($p\text{-value} = 0,060$).
16. Terdapat hubungan signifikan antara penggunaan internet dengan kepemilikan JKN bagi pekerja sektor informal di Provinsi Sumatera Barat ($p\text{-value} = 0,000$).

17. Terdapat hubungan signifikan antara keluhan kesehatan dengan kepemilikan JKN bagi pekerja sektor informal di Provinsi Sumatera Barat ($p\text{-value} = 0,000$).
18. Faktor yang paling dominan berhubungan kepemilikan JKN pada pekerja sektor informal di Provinsi Sumatera Barat adalah daerah tempat tinggal ($OR = 1,941$).

6.2 Saran

6.2.1 Bagi Kementerian Kesehatan

Kemendes dengan beberapa lembaga terkait lainnya seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, dan BPJS Kesehatan harus saling membantu meningkatkan partisipasi pekerja sektor informal. Langkah yang dapat diambil adalah dengan memaksimalkan regulasi dan peraturan terkait kewajiban menjadi peserta JKN. Selain itu pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan swasta agar mereka mewajibkan seluruh pekerja mendaftarkan diri dalam program JKN.

6.2.2 Bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat bisa menyediakan akses ke rumah sakit dan klinik terkemuka, dokter spesialis, dan fasilitas kesehatan lainnya yang dibutuhkan oleh pekerja informal dengan pengeluaran per kapita 60 persen teratas agar mereka mau berpartisipasi dalam program JKN.

6.2.3 Bagi BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan dapat menyediakan sumber daya digital yang komprehensif tentang BPJS, termasuk infografis, video pendek, dan artikel yang mudah dipahami tentang manfaat dan prosedur pendaftaran. Selain itu dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat atau tokoh adat yang menjadi panutan masyarakat.

6.2.4 Bagi Peneliti Lain

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam penelitian selanjutnya untuk melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan kepemilikan JKN.
2. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk menilai pemanfaatan JKN bagi pekerja sektor informal terutama di wilayah Sumatera Barat.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan meneliti tentang determinan kepemilikan JKN bagi pekerja sektor informal berdasarkan jenis jaminan kesehatan yang dimilikinya sehingga lebih tergambar di kelompok peserta mana pekerja informal yang masih sedikit.
4. Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya dilakukan perbandingan determinan kepemilikan jaminan kesehatan berdasarkan segmen kepesertaannya, yaitu PBI, Non PBI, dan asuransi swasta/perusahaan.

